

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh perencanaan anggaran, penerapan *e-procurement*, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran pada sebagian OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka makin baik pula penyerapan belanja modalnya.
2. Penerapan *e-procurement* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya penerapan *e-procurement* yang dilaksanakan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak mempengaruhi penyerapan belanja modal.
3. Kompetensi aparatur pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi aparatur pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka semakin baik pula penyerapan belanja modal.
4. Perencanaan anggaran, penerapan *e-procurement* dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kualitas perencanaan anggaran, penerapan *e-procurement* dan kompetensi aparatur pemerintah secara bersama-sama akan meningkatkan penyerapan belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5.2. Saran

Dalam rangka mengatasi permasalahan keterlambatan penyerapan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran hendaknya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, mulai dari saat penyusunan DPA, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan *timeline*, detail kegiatan sebelum proses pelaksanaan anggaran, dan meningkatkan kualitas revisi anggaran.
2. Agar terciptanya perencanaan anggaran yang baik, diperlukan kompetensi aparatur pemerintah yang memadai. OPD hendaknya meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dengan mengikutsertakan aparatur pemerintah kedalam pelatihan, *workshop* dan kegiatan sejenisnya secara kontinyu.
3. Mempercepat tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa agar proses penyerapan belanja modal dapat direalisasikan secara optimal.
4. Agar mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempercepat penyerapan belanja modal, hendaknya diadakan penelitian lebih lanjut dengan menambah variabel independen seperti pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan anggaran pada penelitian selanjutnya.